



PERFORMANCE SUPERVISION IN REALIZING THE DEVELOPMENT GOALS OF REGIONAL APPARATUS RESOURCES

(Pengawasan Kinerja Dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Sumber Daya Aparatur Daerah)

Jarl Koagouw ¹⁾

Novrabella Clarashinta Pakasi ²⁾

Regional Inspectorate Of North Sulawesi Province^{1,2,3)}

Email: jarlkoagouw@rocketmail.com

kemper_pakasi@yahoo.com

ABSTRACT

This paper examines the extent of the implementation of supervision of performance in realizing the objectives of the development of the regional apparatus of North Sulawesi, in addition to knowing the factors that are supporting and inhibiting. This research is a qualitative descriptive study, with interviews. The results of the study show that the factor that is a supporter of the increasing performance of the state civil apparatus is an increase in the quality of human resources, as well as the desire of policy makers to follow up on recommendations issued through performance monitoring. The factor that becomes an obstacle to the obstruction of the objectives of regional development is because there is an unfair sense due to the absence of rewards and punishment. In addition to ignoring recommendations on the results of supervision of performance, the continued practice of collusion and nepotism in the determination of positions is also a determining factor in hampering the achievement of North Sulawesi's development goals.

Keywords: Supervision ; Performance ; Development

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji tentang sejauh mana pelaksanaan pengawasan kinerja dalam mewujudkan tujuan pembangunan sumber daya aparatur Daerah Provinsi Sulawesi Utara, disamping itu untuk mengetahui faktor yang menjadi pendukung dan penghambat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menjadi pendukung dari meningkatnya kinerja aparatur sipil negara adalah adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia, juga adanya keinginan pengambil kebijakan untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan melalui pengawasan kinerja. Faktor yang menjadi kendala dari terhambatnya tujuan pembangunan daerah adalah karena adanya rasa tidak adil disebabkan tidak adanya penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*). Selain itu mengabaikan rekomendasi hasil pengawasan kinerja, masih adanya praktek kolusi dan nepotisme dalam penentuan jabatan juga menjadi faktor penentu dari terhambatnya pencapaian tujuan pembangunan Sulawesi Utara.

Kata Kunci : *Pengawasan ; Kinerja ; Pembangunan*

1. PENDAHULUAN

Konstitusi Negara Republik Indonesia menggariskan bahwa tujuan bernegara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Upaya melindungi segenap bangsa menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam hal ini dilaksanakan oleh institusi-institusi pemerintah melalui suatu penyelenggaraan pemerintahan. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan harus ditunjang dengan kemampuan kinerja aparatur sipil negara. Untuk mewujudkan hal ini, maka kinerja aparatur sipil negara harus dikawal melalui suatu mekanisme pengawasan kinerja, sehingga kualitas yang diharapkan dapat tetap terjaga dan sesuai dengan standar yang diharapkan.

Pengawasan kinerja bagi aparatur menjadi begitu penting, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kinerja aparatur merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan tujuan pembangunan daerah. Kinerja aparatur yang baik, dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap jalannya roda pemerintahan, sehingga berdampak pada tujuan pembangunan daerah. Tujuan pembangunan di daerah menjadi hal yang mustahil tercapai, apabila kinerja aparatur tidak diperhatikan. Kinerja aparatur merupakan faktor yang perlu ditingkatkan. Peningkatan kinerja aparatur dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bagi aparatur yang memenuhi syarat, sehingga aparatur yang memenuhi syarat dari aspek pendidikan dan pangkatlah yang seharusnya mendapatkan posisi.

Paradigma inilah yang diperlukan dalam era pembangunan dewasa ini, sehingga faktor karena “kedekatan” dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Lambatnya pembangunan di daerah karena tidak lepas dari peran aparatur yang memiliki kinerja tidak baik. Hal ini turut dipengaruhi oleh faktor KKN ditubuh pemerintahan. Oleh karenanya, menjadi penting bagi pemerintah untuk memerhatikan kinerja aparatur melalui suatu metode, yaitu pengawasan.

Pengawasan merupakan proses pengamatan, penentuan standar yang akan dicapai, menilai pelaksanaan, dan jika perlu mengambil tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan menurut Siagian (2008), merupakan proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa pengawasan hanya dilaksanakan pada kegiatan-kegiatan yang sedang berproses, sedangkan yang telah selesai berproses, maka pengawasan tidak dapat diterapkan. Terry (2009) menambahkan bahwa pengawasan merupakan penentuan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi, dan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana. Hal yang sama yang dinyatakan oleh Situmorang dan Juhir (2008) bahwa pengawasan menurut mereka yaitu setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Dalam artian ini bahwa pengawasan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan apakah suatu pelaksanaan telah sesuai dengan ketentuan dan sasaran yang telah ditetapkan atau tidak.

Lamatenggo (2011), berpendapat bahwa pengawasan yang dilaksanakan aparat pengawas intern pemerintah diharapkan dapat

memberikan masukan kepada pimpinan penyelenggara pemerintahan mengenai hasil, hambatan, dan penyimpangan yang terjadi atas jalannya pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tanggung jawab para pimpinan penyelenggara pemerintahan yang berdampak pada kinerja Instansi Pemerintah, sehingga terpenuhinya pencapaian kinerja dari sasaran pemeriksaan/pengawasan yang sesuai dengan target yang dapat dikategorikan baik merupakan suatu hal yang diharapkan bersama. Gambaran tersebut, memberikan pesan kepada kita bahwa pengawasan terhadap kinerja serta kinerja yang baik dari aparatur sipil negara, merupakan faktor yang sangat penting dalam penentuan tercapainya tujuan pembangunan di daerah. Pengawasan kinerja bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan kinerja aparatur sipil negara agar sesuai dengan tujuan dan fungsi organisasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari penjabaran diatas, maka dapat diketahui bahwa pengawasan kinerja memiliki peran yang penting yang akan memengaruhi tujuan pencapaian pembangunan daerah. dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur maka perlu diadakan kajian faktor yang terkait dengan pengawasan kinerja dan pembangunan daerah. Dengan demikian penulisan ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji pengawasan kinerja, sehingga hasilnya dapat memberikan kontribusi bagi pemegang kebijakan dan pengambil keputusan di daerah. Salah satu upaya melindungi segenap bangsa, melalui pembentukan berbagai institusi di bidang pengawasan. Tujuan penelitian lebih fokus untuk mengetahui pengawasan kinerja dalam mewujudkan tujuan pembangunan sumber daya aparatur daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

2. METODE PENELITIAN

Obyek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan aspek yang dikaji adalah peran pengawasan kinerja dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah yaitu menyangkut pembangunan sumber daya aparatur daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu melalui wawancara dimana data dan informasi yang dikumpulkan yang diharapkan dari responden seperti pendapat, dan saran terhadap suatu persoalan.

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

Sumber Data

Data primer dikumpulkan secara langsung dari informan dengan menggunakan teknik wawancara serta observasi, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pengkajian bahan pustaka berupa buku, peraturan, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Informan dalam penelitian ini yaitu Auditor (2 orang) dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah (P2UPD) (2 orang) pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Metode Analisis Data

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengawasan kinerja dalam mewujudkan tujuan pembangunan sumber daya aparatur daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN**3.1 Hasil Penelitian**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan kinerja oleh Inspektorat Daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah di Sulawesi Utara khususnya pembangunan sumber daya aparatur daerah, memiliki peran yang sangat penting. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pengawasan kinerja dapat memperbaiki kekurangan, kesalahan, serta “mengobati” penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan roda pemerintahan melalui rekomendasi-rekomendasi hasil pengawasan kinerja.

Secara umum tujuan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah Sulawesi Utara yaitu dengan pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur untuk menjamin agar suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana dan aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Hasil wawancara dengan seorang Auditor Muda (RP, 32th) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, bahwa :

“Pengawasan kinerja dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan sangat penting. Pengawasan yang kami dalam hal ini para pengawas dari Inspektorat Daerah dilakukan dengan tujuan yaitu pertama kami menilai seluruh pelaksanaan program dan kegiatan pada perangkat daerah yang dilaksanakan oleh aparatur sudah memiliki ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; Kedua kami mendeteksi secara dini apakah ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan aparatur dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada perangkat daerah. Hal ini penting karena dengan pelaksanaan pengawasan yang mampu mendeteksi kecurangan-kecurangan yang terjadi, maka akan ada langkah perbaikan, serta ada langkah-langkah pencegahan agar kecurangan-kecurangan tidak terjadi lagi. Khusus untuk faktor yang menjadi kendala terdapat pencapaian tujuan pembangunan daerah menurut saya salah satunya yaitu dikarenakan adanya rasa tidak adil oleh aparatur-aparatur yang disebabkan tidak adanya penghargaan (reward) terhadap kinerja mereka dan hukuman (punishment) terhadap aparatur yang tidak memiliki kinerja yang baik.”

Hasil wawancara dengan Auditor Inspektorat daerah di atas senada dengan yang diungkapkan oleh informan yang berasal dari pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah (P2UPD) (CLD, 38th) pada Inspektorat Daerah karena menurutnya :

“Dengan pelaksanaan pengawasan secara berkala dalam mengawasi kinerja aparatur dan kinerja organisasi perangkat daerah maka akan mampu menjamin terlaksananya penyelenggaraan tugas umum

pemerintahan dan pembangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa”.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja aparatur sipil negara menjadi faktor penentu terwujudnya tujuan pembangunan Sulawesi Utara. Aparatur dengan kinerja yang buruk dengan sendirinya memengaruhi keberhasilan pencapaian program/kegiatan yang pada akhirnya berimplikasi pada pencapaian tujuan pembangunan itu sendiri. Dalam mencapai tujuan pembangunan, perangkat daerah menyusun perencanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan dokumen-dokumen perencanaan dari Pemerintah Daerah. Hal ini penting karena perencanaan tanpa memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan pemerintah daerah seperti RPJMD dan RKPD maka otomatis tidak akan bisa mewujudkan apa yang menjadi tujuan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara.

Hasil wawancara dengan Auditor Muda Inspektorat (MK, 38) Daerah Provinsi Sulawesi Utara, bahwa :

“Pengawasan terhadap kinerja aparatur dalam mewujudkan tujuan pembangunan sangat penting, karena dengan adanya pengawasan maka dokumen-dokumen perencanaan seperti Renstra dan Renja Perangkat Daerah benar-benar menjadi dokumen penting dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan pada perangkat daerah. Renstra merupakan dokumen yang dijadikan pedoman atau acuan penyusunan perencanaan yang didalamnya terdapat visi, misi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan daerah, serta tahapan pelaksanaan selama lima tahun dari perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sedangkan Renja merupakan dokumen perencanaan tahunan dari perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari dokumen Renstra. Memang saat ini jujur saya katakan, belum semua perangkat daerah dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan sudah sesuai dengan dokumen perencanaan yang menjadi acuan seperti Renstra dan Renja Perangkat daerah, hal ini dibuktikan pada saat dilakukan reviu dokumen rencana kerja anggaran perangkat daerah masih ditemui adanya ketidak selarasan antara dokumen rencana kerja anggaran perangkat daerah dengan Renstra dan Renja perangkat daerah. Ketidak selarasan yang terjadi karena dalam penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah tidak disusun oleh aparatur sipil negara yang benar-benar berkompeten, akibatnya tujuan pembangunan bisa tidak tercapai akibat tidak ditunjang oleh program dan kegiatan yang tepat yang direncanakan oleh perangkat daerah. Untuk itulah peran pengawasan kinerja dari Inspektortat daerah, karena dengan adanya pengawasan maka antisipasi ataupun koreksi dapat dilakukan oleh perangkat daerah”.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa kualitas pemeriksa mempengaruhi kualitas hasil pengawasan kinerja. Inspektorat Daerah,

merupakan salah satu alat bagi manajemen untuk mewujudkan tujuan pembangunan pada pemerintah daerah (RKPD 2019), yang meliputi:

1. Meningkatkan kesejahteraan petani perkebunan, nelayan, IKM-UMKM, Koperasi dan pelaku jasa kemasyarakatan
2. Mengoptimalkan pelayanan publik
3. Meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan kelautan melalui usaha ekonomi kreatif
4. Peningkatan tata kelola laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil
5. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas cerdas dan berdaya saing
6. Mewujudkan SDM yang sehat dengan derajat kesehatan dan gizi yang tinggi sebagai bagian dari upaya pencapaian *sustainable development goals*
7. Memasyarakatkan dan membina olahraga dan meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan
8. Membentuk SDM yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
9. Memantapkan kenyamanan, keamanan dan ketertiban masyarakat
10. Memperkuat jati diri karakter masyarakat Sulawesi Utara sebagai wujud revolusi mental dengan mendorong kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
11. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional di Sulawesi Utara
12. Meningkatkan peningkatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan pariwisata
13. Mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi untuk mendorong percepatan pencapaian *sustainable development goals*
14. Meningkatkan keberpihakan kepada kelompok masyarakat miskin untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran dengan berpedoman pada strategi penanggulangan kemiskinan daerah ODSK (operasi daerah selesaikan kemiskinan) Provinsi Sulawesi Utara
15. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang profesional dan berdaya saing dalam menghadapi kerjasama masyarakat ekonomi ASEAN.
16. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan kepulauan dan kawasan perbatasan.
17. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penataan ruang.
18. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas melalui percepatan dan ketepatan pembangunan.
19. Melestarikan lingkungan hidup melalui upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan keanekaragaman hayati.
20. Meningkatkan usaha pengendalian dan pengurangan resiko bencana.
21. Mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah melalui pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat
22. Mendorong peningkatan pendapatan masyarakat terhadap jasa pariwisata dan kemaritiman berorientasi internasional.
23. Memantapkan kualitas pelayanan berorientasi global di Sulawesi Utara.
24. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
25. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menuju wilayah taat administrasi dan wilayah bebas korupsi.

26. Meningkatkan konsistensi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan
27. Meningkatkan integritas aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik

Untuk mencapai harapan tersebut maka jelas diperlukan sumber daya manusia yang berkompeten dan berintegritas untuk mengisi posisi-posisi strategis pada perangkat daerah maupun sebagai pengawas internal Pemerintahan. Menurut Manossoh (2016) bahwa kalau kita punya sistem yang baik dilaksanakan oleh orang yang baik (*good people, good sistem*) itu sempurna. Sistemnya tidak baik orangnya baik (*bad sistem good people*) ini masih bisa dibantu, masih bisa tertolong, masih bisa diperbaiki. Kenapa demikian, karena meskipun orang bekerja dengan cara manual tanpa menggunakan sistem dengan baik tapi karena orangnya baik/dia tidak mau berbuat jahat dan tentunya tidak akan terjadi *fraud*. Tapi kalau sistemnya baik orangnya tidak baik (*good sistem bad people*) itu rusak. Sebaik apapun sistem kalau orangnya tidak baik pasti rusak. Karena di jebol orang tidak baik. Lebih parah lagi jika sistemnya tidak baik dan orangnya tidak baik (*bad sistem bad people*) itu hancur.

Hasil wawancara dengan informan yang berasal dari Pejabat pengawas Urusan pemerintahan daerah (P2UPD) (JM, 44th) pada Inspektorat Daerah karena menurutnya :

“Kualitas para pengawas internal Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah cukup baik. Hal ini dikarenakan banyaknya program-program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas para pengawas di Inspektorat. Program-program pemerintah antara lain dengan pendidikan dan pelatihan yang sangat sering dilaksanakan juga adanya program dari BPKP lewat pemberian beasiswa kepada para auditor untuk melanjutkan pendidikan. Dengan semakin berkualitasnya para pengawas di Inspektorat otomatis mampu untuk melaksanakan pengawasan dengan hasil yang maksimal, dimana para pengawas bisa mendeteksi kelemahan-kelemahan di perangkat daerah khususnya menyangkut kinerjanya, sehingga dengan demikian Inspektorat daerah mampu memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk memperbaiki jika ada kelemahan-kelemahan pada perangkat daerah. Namun yang menjadi permasalahan yaitu tidak semua rekomendasi perbaikan yang diberikan inspektorat ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Selain itu mengabaikan rekomendasi hasil pengawasan kinerja, masih adanya praktek kolusi dan nepotisme dalam penentuan jabatan juga menjadi faktor penentu dari terhambatnya pencapaian tujuan pembangunan Sulawesi Utara.

Untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi dari Inspektorat daerah diperlukan komitmen dari pengambil keputusan/kebijakan. Apabila rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dari proses pengawasan kinerja ditindaklanjuti oleh pengambil kebijakan dan bahkan dijadikan bahan pertimbangan dalam pemberian *reward* dan *punishment*, maka akan tercipta suasana kerja yang sehat, yang penuh dengan kompetitif positif. Peran pengambil kebijakan yang mengindahkan rekomendasi-rekomendasi hasil

pengawasan kinerja, menciptakan rasa adil di kalangan aparatur sipil negara. Untuk meningkatkan kualitas kinerja Aparatur Sipil Negara, maka tentunya juga pendidikan dan pelatihan tidak dapat diabaikan oleh pengambil keputusan. Pendidikan dan pelatihan menjadi faktor dasar untuk membentuk kualitas seorang aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, disamping adanya pengawasan melalui pengawasan terhadap kinerja dari aparatur sipil negara itu sendiri. Dengan demikian pengawasan kinerja memiliki andil yang sangat besar dalam menentukan terwujudnya pembangunan daerah di Sulawesi Utara.

3.2 Pembahasan

Kendala terbesar dalam mewujudkan pembangunan daerah adalah adanya pengisian jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensi apartur. Praktek ini tanpa disadari menjadi pemicu turunnya semangat kerja dari para aparatur sipil negara, yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja. Kondisi ini sangat merugikan keberadaan penyelenggaraan roda pemerintahan.

Pengawasan kinerja akan sangat berguna dan bermanfaat dalam mewujudkan pembangunan Sulawesi Utara apabila adanya komitmen pengambil keputusan/kebijakan untuk mewujudkan pembangunan. Sebaik apapun hasil pengawasan kinerja, apabila tidak adanya komitmen pimpinan, maka hanya akan menjadi sia-sia. Sebaliknya komitmen yang kuat tanpa didukung dengan hasil pengawasan kinerja yang baik, sama dengan berjalan di dalam “kegelapan”. Karena tidak tahu arah kemana, tujuan. Pengambil keputusan tidak dapat mengetahui dimana penyimpangan, kesalahan-kesalahan yang terjadi, apa yang harus diperbaiki, dan apa yang menjadi penyebab dari terjadinya suatu penyimpangan, kesalahan. Sehingga apapun upaya yang dilakukan, tanpa adanya referensi hasil pengawasan kinerja, pengambil keputusan tidak akan menemukan penyebab dari suatu akar permasalahan yang terjadi. Akibatnya tidak dapat diketahui solusi yang tepat yang dapat diberikan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi, sekaligus menjadi bahan untuk mengambil langkah selanjutnya.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka yang menjadi fokus temuan adalah pengawasan kinerja oleh Inspektorat Daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah di Sulawesi Utara terutama dalam rangka pembangunan sumber daya aparatur daerah memiliki peran yang sangat penting. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa faktor yang menjadi pendukung dari meningkatnya kinerja aparatur sipil negara adalah adanya peningkatan sumber daya manusia, juga adanya keinginan pengambil kebijakan untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan melalui pengawasan kinerja oleh Inspektorat Daerah. Faktor yang menjadi kendala dari terhambatnya tujuan pembangunan daerah adalah karena adanya rasa tidak adil disebabkan tidak adanya penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*). Selain itu mengabaikan rekomendasi hasil pengawasan kinerja, masih adanya praktek kolusi dan nepotisme dalam penentuan jabatan juga menjadi faktor penentu dari terhambatnya pencapaian tujuan pembangunan Sulawesi Utara.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Sarwoto, 2011. Dasar-Dasar Organisasi Dan Management. Suci Press. Bandung.
- Siagian, S. P. 2008. Filsafat Administrasi. PT Bumi. Aksara. Jakarta.
- Situmorang, V. M. dan Juhir J. 2008. Aspek Hukum Pengawasan Melekat. Rineka Cipta. Yogyakarta.
- Terry, G. R. 2009. Prinsip-prinsip Manajemen. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta.

Jurnal :

- Lamatenggo, M.B. 2011. Faktor- Faktor Kompetensi Inspektorat dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Inspektorat Kabupaten Gorontalo. Jurnal Universitas Hasanudin. Makassar.
- Manossoh, H. 2016. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Fraud Pada Pemerintah Di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 484-495

Peraturan :

- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
- Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019